



ANALISIS PENERAPAN *ENVIRONMENTAL ACCOUNTING* TERHADAP INDUSTRI BATANG KELAPA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Jacqueline Greety Wenas¹, Jerry Sonny Lintong², Deyke J.F.Mandang³

Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado, Manado ^{1,2}

Konstruksi Bangunan Gedung, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Manado, Manado³

E-mail:sonetyjo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan konsep akuntansi lingkungan (environmental accounting) pada entitas usaha batang kelapa di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), agar mampu meminimalisasi masalah lingkungan ke arah peningkatan efisiensi pengelolaan lingkungan melalui penilaian kegiatan lingkungan atas biaya dan manfaat serta dampak lingkungan sebagai tanggung jawab sosial entitas usaha terhadap masyarakat sekitar dengan tetap melestarikan ketersediaan sumber daya alam berkelanjutan. Walaupun pencatatan dan pelaporan biaya yang berhubungan dengan biaya pengelolaan lingkungan tidak semua sama, karena belum diatur dalam satu standar, namun kajian dilakukan sesuai PSAK 1, PSAK 14, PSAK 16, dan SAK EMKM yang dapat menjadi acuan dalam hal akuntansi terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi; wawancara terstruktur kepada informan kunci yaitu pimpinan entitas dan staf administrasi KSU Makaria di Kabupaten Minut sebagai data primer; dan data sekunder meliputi dokumentasi, jurnal, serta studi pustaka lainnya, selanjutnya dianalisa sesuai konsep penerapan akuntansi lingkungan sampai ke tahap kesimpulan. Kesimpulan atas penelitian ini, bahwa usaha industri batang kelapa di entitas tersebut belum menerapkan klasifikasi biaya-biaya lingkungan dan perlakuan akuntansi lingkungan, walaupun dalam hal pengelolaan limbah telah berusaha memberdayakan limbah lingkungan ke arah produktifitas.

Kata kunci: *akuntansi lingkungan, industri batang kelapa, penerapan.*

1. PENDAHULUAN

Penebangan pohon kelapa untuk dijadikan sebagai produk kelapa tanpa memperhatikan keutuhan lingkungan, kelestarian dan pemeliharaan atau perlindungan lingkungan hidup, akan berdampak pada berkurangnya tanaman kelapa. Sulawesi Utara (Sulut) yang dijuluki “Negeri Nyiur Melambai” akan menjadi sebuah kenangan yang cukup untuk dikenang dan tidak akan menjadi sesuatu yang dibanggakan. Industri produk batang kelapa tersebar di Provinsi Sulut, lebih khusus di Kabupaten Minut, karena lahan tanaman kelapa cukup banyak berada di lokasi daerah tersebut dan termasuk peringkat kedua di Sulut. Peranan akuntansi lingkungan sangat diperlukan dalam kegiatan usaha ini, guna mengkaji penggunaan konsep akuntansi lingkungan agar mampu meminimalisasi masalah lingkungan ke arah peningkatan efisiensi pengelolaan lingkungan melalui penilaian kegiatan lingkungan atas biaya dan manfaat, sebagai komitmen atas tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagai alat untuk mengontrol manajemen lingkungan usaha.

Tujuan penelitian untuk mengkaji penggunaan konsep Akuntansi Lingkungan industri produk batang kelapa di Kabupaten Minut, agar mampu meminimalisasi masalah lingkungan

kearah peningkatan efisiensi pengelolaan lingkungan melalui penilaian kegiatan lingkungan atas biaya dan manfaat serta dampak lingkungan sebagai tanggung jawab sosial pelaku usaha terhadap masyarakat sekitar dengan tetap melestarikan ketersediaan sumber daya alam berkelanjutan. Tujuan secara institusi disesuaikan berdasarkan indikator kinerja penelitian yang dituangkan dalam Rencana Strategi Penelitian Politeknik Negeri Manado Tahun 2022-2024 yaitu dapat dimanfaatkan untuk pengembangan materi pembelajaran dan kurikulum yang diarahkan pada penerapan bagi masyarakat dunia usaha serta Bidang Unggulan penelitian yaitu Pengembangan pengolahan komoditas kelapa untuk mendukung pemberdayaan sumber daya alam Sulut.

Konsep perlakuan Akuntansi Lingkungan khususnya untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, dan penyajian mengacu pada SAK EMKM, PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dan PSAK 14 Persediaan, PSAK 16 Aset Tetap (Indonesia Ikatan Akuntan, 2022), juga ditunjang dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Selain itu, dengan aturan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Spesifiknya, kajian dilakukan atas aspek-aspek akuntansi lingkungan seperti: pengakuan identifikasi pengaruh negatif aktivitas bisnis perusahaan terhadap lingkungan dalam praktik akuntansi konvensional; identifikasi persoalan bidang akuntansi konvensional yang bertentangan dengan kriteria lingkungan serta memberikan solusi; melaksanakan langkah-langkah proaktif dalam menyusun inisiatif memperbaiki lingkungan pada praktik akuntansi konvensional; pengembangan sistem pengendalian pendukung keputusan manajemen ramah lingkungan; identifikasi biaya dan pendapatan atas kepedulian lingkungan dari berbagai program perbaikan; pengembangan format kerja, penilaian, serta pelaporan internal dan eksternal.

Penerapan Akuntansi Lingkungan dapat menunjukkan kepedulian dan kesadaran secara nyata dalam melakukan konservasi lingkungan untuk melestarikan sumber daya alam yang produktif dengan mempertimbangkan faktor-faktor biaya konservasi lingkungan, keuntungan konservasi, dan profit dari kegiatan konservasi lingkungan. Walaupun pengungkapan mengenai akuntansi lingkungan belum dinyatakan secara khusus sebagai suatu standar, namun Dewan standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) sangat berupaya untuk merealisasikan penyusunan Standar Akuntansi Lingkungan (SAL). Perbandingan kajian penelitian terdahulu dapat dilihat melalui hasil penelitian dari (Puspita & Surendra, 2019), yang menyatakan bahwa identifikasi yang dilakukan untuk biaya lingkungan di perlakukan sebagai biaya umum, untuk tahap pengakuan nilai dan jumlah pembiayaan lingkungan diakui sebagai biaya lingkungan, dan tahap pengukuran untuk pembiayaan lingkungan dengan acuan realisasi periode sebelumnya, sedangkan tahap penyajian alokasi biaya lingkungan disajikan bersama biaya unit lain yang serumpun.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif komparatif, karena peneliti ingin menggali informasi, memahami pendapat informan, menganalisis kesesuaian konsep akuntansi lingkungan dan penerapannya pada entitas usaha.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi; wawancara terstruktur kepada informasi kunci (*key informan*) yaitu pimpinan KSU dan staf administrasi, sebagai data primer; dan dokumentasi data perusahaan yang diperoleh langsung dari perusahaan dan jurnal dari media elektronik dilengkapi dengan studi pustaka sebagai data sekunder.

2.3 Teknik Analisis Data

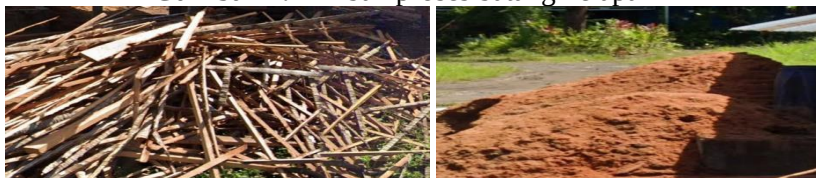
Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi biaya-biaya yang di catat dalam hubungannya dengan biaya pengolahan lingkungan melalui tahap-tahap sebagai berikut: identifikasi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan industri produk tersebut; kemudian dibandingkan konsep penerapan secara umum sesuai PSAK 1, PSAK 14, PSAK 16, dan SAK EMKM; dan terakhir memberikan kesimpulan atas hasil pembahasan. Apabila hasil analisa masih terdapat perbedaan-perbedaan dengan konsep yang ada dan PSAK yang mendukung, maka peneliti memberikan saran atau masukan yang diperlukan sebagai rekomendasi bagi pelaku usaha.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Penelitian mengenai penerapan akuntansi lingkungan (*environmental accounting*) industri batang kelapa dilakukan pada UKM Koperasi Serba Usaha (KSU) “Makaria” di Kabupaten Minahasa Utara, dengan pimpinannya adalah Bapak S. Panggua sebagai ketua umum. KSU “Makaria” giat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi UKM Kabupaten Minahasa Utara. Istilah batang kelapa dalam kalangan usaha industri tersebut, sering disebut kayu kelapa. Kegiatan utama usaha ini mulai dilakukan pada Tahun 2011 di bawah naungan Izin Usaha KSU “Makaria”. Kegiatan utama usaha entitas tersebut, terdiri dari: Penjualan batang/kayu kelapa, penjualan kayu biasa, penggergajian (*sawmill*) batang/kayu kelapa, dan penggergajian (*sawmill*) kayu biasa. Sedangkan usaha sampingan atas akibat sisa dari pengolahan industri batang kelapa seperti limbah proses batang kelapa berupa serpihan-serpihan dan potongan-potongan kayu bulat (Gambar 1) yang termasuk volume 25-40% (area bagian luar batang kayu yang masih mengandung sel-sel hidup) yang diberdayakan masyarakat sebagai kepedulian pelaku usaha terhadap kepedulian sosial dan lingkungan, terdiri dari serpihan dan potongan batang kelapa untuk: kayu bakar dalam proses pengasapan ikan cakalang, diolah menjadi serbuk untuk pupuk tanaman hias, diolah menjadi serbuk untuk alas dikandang ayam, dan menjadi bahan baku kerajinan tangan.

Gambar 1: Limbah proses batang kelapa



Sumber: UKM Koperasi Serba Usaha (KSU) Makaria (2023)

Usaha sampingan dari sisa proses pengolahan batang kelapa, dijual sebagai kayu bakar pengasapan ikan cakalang di jual dengan harga Rp.250.000,00 per kendaraan *pick up*, sedangkan serbuk di jual dengan harga Rp.5.000,00 per karung.

Hasil industri batang kelapa tersebut sebagian besar di pasok dari wilayah sekitar

Kabupaten Minahasa Utara, antara lain Desa Kokole, Batu, dan Wori. Mengenai pasokan pohon kelapa, awal pengadaan berupa kayu gelondongan/kayu bulat. Pembeliannya langsung dari perkebunan saat masih berupa pohon kelapa dan rata-rata harga pohon tersebut sebesar Rp 200.000 hingga 250.000,00. Penebangan pohon kelapa dari lokasi harus berdasarkan surat survei, surat ukur atau sertifikat tanah lokasi. Kemudian dipotong dan diangkut dengan kendaraan ke tempat penggergajian. Selama pengangkutan, polisi hutan akan melakukan pengecekan untuk memastikan kelayakan penebangan pohon dan mencegah pembakaran liar di hutan lindung Wilayah Administratif Daerah Minahasa Utara. Tenaga kerja pada perusahaan ini meliputi: 2 orang penggergaji, 2 orang pengangkut, 1 orang supir dan 2 orang pemotong kayu. Proses industri batang kelapa ini setelah tiba di lokasi *sawmill* (Gambar 2), dimulai dari tahap-tahap sebagai berikut: Gelondongan/kayu bulat pohon kelapa yang ditebang selanjutnya dilakukan pengupasan; Memperkirakan volume papan dan balok yang akan dihasilkan dengan merencanakan cara penggergajian batang kelapa/kayu bulat; Penyusunan papan sesuai lebar dan tebal papan kayu kelapa serta pembelahan papan menjadi ukuran yang lebih kecil guna proses menjadi produk lainnya; dan Pengeringan kayu kelapa.

Gambar 2: penggergajian (*sawmill*)



Sumber: UKM KSU Makaria (2023)

Penjualan produk batang kelapa/kayu kelapa sebagian besar di distribusikan ke seputaran wilayah Minahasa Utara, Manado, Bitung, Tomohon, dan Tondano. Rata-rata harga batang kelapa sebesar Rp.1.000.000,00 sampai Rp.1.200.000,00 /m³. Tempat usaha industri batang kelapa sebagai lokasi *sawmill* ini berada pada ruangan yang terbuka dan dekat dengan pemukiman masyarakat sekitar di Jalan Raya Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara.

Administrasi pencatatan kegiatan usaha ini hanya dilakukan melalui pencatatan biasa untuk pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran transaksi dari usaha tersebut, walaupun izin usaha untuk industri batang kelapa ini, menggunakan ijin usaha berbadan hukum dari KSU “Makaria” Minahasa Utara. Kegiatan yang menunjang dalam kepedulian sosial dan lingkungan dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar dimana usaha ini berada, antara lain seperti kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan melalui pendistribusian serpihan dan potongan-potongan proses batang kelapa untuk diberdayakan oleh masyarakat dalam membuat kerajinan tangan, untuk kayu bakar dalam proses pengasapan ikan cakalang, di olah menjadi serbuk untuk pupuk tanaman hias dan alas di kandang peternakan ayam. Limbah kayu kelapa berupa serpihan, potongan-potongan, dan kayu bulat yang termasuk volume 25-40% (area bagian luar batang kayu yang masih mengandung sel-sel hidup) itulah yang di distribusikan ke masyarakat sebagai sumber daya atas kepedulian sosial dan lingkungan.

3.2 Pembahasan

Perbandingan dari hasil analisis penerapan konsep Akuntansi Lingkungan (*Environmental Accounting*) yang mengacu pada PSAK 1, PSAK 14, PSAK 16, dan SAK EMKM dalam hal biaya-biaya lingkungan di industri batang kelapa pada KSU Makaria, dapat dilihat pada Tabel Analisis Kesesuaian (Tabel 2) berikut ini:

Tabel 2: Analisis Kesesuaian Biaya Lingkungan

Konsep Akuntansi Lingkungan	Penerapan KSU Makaria	Ket
Pengakuan, pengukuran, dan penyajian biaya pengelolaan lingkungan hidup dalam aktivitas produksi diakui sebagai beban.	Perlakuan akuntansi lingkungan dalam hal klasifikasi biaya-biaya Lingkungan terhadap aktivitas produksi belum diterapkan sesuai standar akuntansi yang berlaku dalam transaksi kegiatan industri batang kelapa sebagai beban.	Belum sesuai
Pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas biaya pengelolaan lingkungan hidup dalam aktivitas eksplorasi dan pengembangan diakui sebagai aset tetap.	Perlakuan Akuntansi Lingkungan dalam hal klasifikasi biaya-biaya Lingkungan terhadap aktivitas eksplorasi, budidaya, dan pengembangan belum diterapkan sesuai standar akuntansi yang berlaku dalam transaksi kegiatan industri batang kelapa sebagai aset tetap.	Belum sesuai
Pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan produk dari hasil pemrosesan setelah panen sebagai persediaan.	Perlakuan akuntansi terhadap persediaan produk kayu kelapa/batang kelapa belum diterapkan sesuai acuan standar akuntansi yang berlaku umum.	Belum sesuai
Penyajian Laporan Keuangan entitas setiap periode berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.	Penyajian laporan keuangan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan belum dilakukan secara periode, karena pencatatan transaksi belum dilakukan sesuai kegiatan transaksi.	Belum sesuai
Persyaratan penyajian, struktur, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.	Persyaratan penyajian, struktur, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan belum dilakukan/diterapkan.	Belum sesuai
Biaya pengelolaan lingkungan hidup dalam aktivitas produksi.	Pengelolaan atas kepedulian terhadap lingkungan dilakukan melalui kegiatan pendistribusian limbah batang kelapa kepada <i>stakeholder</i> dilingkungan masyarakat sekitar dan wilayah lainnya. Biaya pengelolaan limbah dari hasil produksi seperti pembuatan serbuk dan potongan-potongan batangkalapa.	Belum sesuai
Biaya pengelolaan lingkungan hidup dalam aktivitas eksplorasi, budidaya, dan pengembangan.	Penebangan dilakukan oleh pelaku usaha, namun belum dilakukan pelestarian atas kegiatan eksplorasi, budidaya, dan pengembangan.	Belum sesuai
Biaya Pencegahan Lingkungan, Biaya deteksi lingkungan, Biaya kegagalan internal lingkungan, Biaya kegagalan eksternallingkungan.	Belum dilakukan kegiatan pencegahan dan kegagalan atas lingkungan. Pencatatan atas transaksinya belum dilakukan sesuai Konsep Akuntansi Lingkungan yang berlaku.	Belum sesuai

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan analisis kesesuaian dan deskripsi atas hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Akuntansi Lingkungan (*Environmental Accounting*) dalam hal industri batang kelapa pada UKM KSU Makaria di Kabupaten Minahasa Utara belum diterapkan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum atas perlakuan akuntansi lingkungan, yang mengambil acuan sesuai PSAK 1, PSAK 14, PSAK 16, dan SAK EMKM. Penerapan atas klasifikasi biaya-biaya lingkungan atas aktivitas produksi; aktivitas eksplorasi, pembudidayaan, dan pengembangan; serta pelaksanaan kegiatan dalam hubungannya dengan kepedulian pelestarian lingkungan belum diterapkan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. KESIMPULAN

Walaupun pengungkapan mengenai akuntansi lingkungan (*environmental accounting*) secara khusus dalam Standar Akuntansi Keuangan belum dinyatakan sebagai suatu standar, namun dapat dikaji sesuai PSAK 1, PSAK 14, PSAK 16, dan SAK EMKM sebagai acuan dalam penerapan akuntansi lingkungan, dalam klasifikasi biaya-biaya lingkungan atas aktivitas produksi dan aktivitas eksplorasi serta pengembangan pengelolaan lingkungan. Kesimpulan atas analisis kesesuaian, yaitu penerapan akuntansi lingkungan pada UKM KSU Makaria di Kabupaten Minahasa Utara atas usaha produk batang/kayu kelapa belum diterapkan sesuai acuan standar akuntansi yang berlaku umum menurut PSAK 1, PSAK 14, PSAK 16, dan SAK EMKM. Dasar perlakuan akuntansi dalam hal penerapan klasifikasi biaya-biaya lingkungan atas aktivitas produksi; aktivitas eksplorasi, pembudidayaan, serta pengembangan; dan pelaksanaan kegiatan pelestarian lingkungan belum diterapkan sesuai SAK yang berlaku umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran atas hasil penelitiannya yaitu sebaiknya pelaku usaha KSU industri batang kelapa di Kabupaten Minahasa Utara menerapkan akuntansi lingkungan (*Environmental Accounting*) sesuai acuan standar akuntansi yang berlaku umum atas perlakuan Akuntansi Lingkungan yaitu PSAK 1, PSAK 14, PSAK 16, dan SAK EMKM; sekaligus melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara pelestarian lingkungan hidup sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan penulisan artikel Penelitian Dasar Produk Vokasi (PDPV) ini sampai pada penyelesaiannya dibantu oleh berbagai pihak, antara lain Pimpinan Politeknik Negeri Manado, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M), Ketua Jurusan dan Pimpinan Jurusan Akuntansi, Pihak KSU Makaria di Minahasa Utara, dan keluarga tercinta, serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas kontribusinya terutama Instansi Politeknik Negeri Manado dalam pendanaan PDPV ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia, (2016), Standar Akuntansi Indonesia (SAK) EMKM, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, (2020), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (PSAK 1) Penyajian Laporan Keuangan*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, (2020), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.14 (PSAK 14) Persediaan*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, (2020), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (PSAK 16) Aset Tetap*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

Ikhsan, A, (2009), *Akuntansi Manajemen Lingkungan. Akuntansi Manajemen*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2021), *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.8/2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi*, 848,11-1.

Mulyani, N.S. (2013). Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Pada Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) Garahan - Jember. *Skripsi*, 57(4).

Mudana E.M. (2021). Akuntansi Lingkungan pada PT.Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda), *Skripsi*, Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Pemerintah Pusat Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. 57, 3.

Pemerintah Pusat Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*. Jakarta.

Pipin, N, dan Eka, N.S, (2019), Analisis Penerapan Green accounting di PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, Vol.2 No1/Mei Tahun 2019, e-ISSN:2623-2596.

Puspita, D. A., & Surendra, A. (2019). Analisis Penerapan Green Accounting (Studi Empiris pada UKM Penggajian Kayu U.d Mega Cipta di Desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Kabupaten Sragen). *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta*, 17(3).

Regina, R.S, Sondakh, J, dan Tirajoh, V.Z, (2019), Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan pada PT.Royal Coconut, *Going Concern Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), April 2019.

Setiawan, T. (2018). Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Pada Dua Puluh Lima Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Sri Kehati 2013. *Jurnal Akuntansi*, 9(2). <https://doi.org/10.25170/jrak.v9i2.22>